

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan isu dalam Ilmu Hubungan Internasional semakin hari semakin bergerak dinamis, meninggalkan segalanya yang sudah terlewatkan dan menjadi permasalahan kompleks yang terjadi pada saat sekarang ini termasuk kedepannya. Hubungan Internasional dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi memperoleh kemajuan dan kemanfaatan bagi ilmu ini. Kedinamisan ilmu inipun salah satunya terlihat dari dinamika isu-isu dan fenomena yang terjadi di dunia internasional yang tidak habis-habisnya untuk selalu kita kaji dan analisa secara mendalam sehingga terurai dari benang kusut keilmuan yang ada, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang sedang terjadi.

Pembangunan ekonomi merupakan isu yang sangat populer dibicarakan pada saat sekarang ini baik oleh akademisi-akademisi Hubungan Internasional dan masyarakat dunia. Salah satu isu yang juga terjadi di kawasan Asia Timur, khususnya yang terjadi di negara Tiongkok dan Hong Kong, dimana Hong Kong yang merupakan salah satu bagian dari negara Tiongkok memiliki sistem perekonomian yang sangat bagus dan maju, dengan demikian Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai salah satu *Special Region Administrative* atau daerah khusus yang memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan daerah lainnya.

A. Latar Belakang

Hong Kong merupakan suatu daerah yang terletak dikawasan ujung tenggara daratan negara Tiongkok, yang memiliki luas wilayah 1.104 kilometer persegi meliputi Pulau Hongkong, Kowloon dan *New Territories* dan kepulauan. Wilayah Hong Kong terbagi menjadi dua sisi yang mana salah satu bagiannya tergabung dengan daratan Tiongkok secara geografis dan wilayah lainnya yang berbentuk kepulauan (Mathews, Ma, & Lui, 2008)

Populasi Hong Kong yang tercatat pada Juli 2017 adalah sejumlah 7.191503 penduduk (Central Intelligence Agency). Penduduk asli Hong Kong pada awalnya adalah sebuah kelompok etnis yang terbentuk oleh orang-orang yang berasal dari etnis China yang jumlahnya mencapai kurang lebih 93,7 % dari banyaknya populasi. Tetapi setelah akhir Perang Dunia II hingga saat ini penduduk Hongkong kebanyakan merupakan keturunan imigran dari daratan China dan imigran dari seluruh dunia. Awal mula kedatangan imigran ke Hong Kong dimulai Sejak perang saudara dan kebangkitan

Partai Komunis pada 1949, kebanyakan dari imigran berasal dari Shanghai (CNN Indonesia, 2014).

Sejarah Hong Kong modern dimulai di abad 19. Pada masa pemerintahan Dinasti Qing, Tiongkok kalah dalam Perang Opium tahun 1842, dan tidak dapat mempertahankan Hong Kong sehingga menjadi daerah kolonial jajahan Inggris. Hong Kong menjadi koloni Inggris dengan diserahkan Pulau Hong Kong, kemudian diikuti Semenanjung Kowloon tahun 1860 dan penyewaan 99 tahun wilayah New Territories di tahun 1898. Setelah berada dibawah kekuasaan Jepang selama Perang Dunia II (1941–1945), Inggris kembali mengontrol Hong Kong hingga 30 Juni 1997.

Hong Kong berkembang dengan sangat cepat di bawah kekuasaan Inggris sehingga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan dunia. Kemudian pada 1982, London dan Beijing memulai perundingan yang sulit mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Tiongkok. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan Tiongkok daratan, yang sejak 1949 berada di bawah kekuasaan Partai Komunis, satu-satunya partai yang dibolehkan berdiri di negara tersebut (BBC Indonesia, 2017).

Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah Hongkong secara resmi dikembalikan oleh pemerintah Britania Raya (Inggris) kepada Republik Rakyat Tiongkok, setelah sebelumnya telah menjadi daerah kolonial Inggris selama kurang lebih 150 tahun. Hong Kong merupakan daerah yang memiliki status otonomi yang tinggi dikarenakan adanya perjanjian dan persetujuan sebelum dikembalikan kepada Tiongkok. Otonomi ini berlaku di Hongkong minimal untuk 50 tahun dihitung dari tahun 1997 (Overholt).

Setelah lepas dari Inggris, Hong Kong menjadi salah satu daerah yang dianggap akan menjadi pusat perekonomian Asia. Hong Kong memiliki perkembangan yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok yang lain dalam berbagai sektor mampu menjadi jembatan penghubung dengan wilayah Tiongkok yang lain karena perekonomiannya yang berkembang sangat maju. Hong Kong juga dikatakan sebagai salah satu bagian dari negara Tiongkok yang memiliki keunikan tersendiri (Michael J. Enright, 1997).

Hong Kong merupakan salah satu daerah yang muncul sebagai kekuatan ekonomi di Tiongkok, dimana dengan adanya efisiensi regulasi berupa kebebasan bisnis yang terlindungi dengan baik dalam kerangka peraturan yang efisien. Transparansi mendorong kewiraswastaan, dan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan

dan operasi bisnis pemula. Kode ketenagakerjaan benar-benar ditegakkan untuk mendorong produktivitas. Hong Kong memiliki kontrol harga yang sangat rendah, akan tetapi terdapat beberapa dana subsidi, harga sewa dan harga perumahan sebagai penunjang untuk telekomunikasi, transportasi umum, dan listrik (Heritage Foundation, 2017).

Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah pusat bisnis, perdagangan dan keuangan internasional. Dengan membangun kebijakan ekonomi pasar bebas tradisionalnya, Hong Kong telah berkembang menjadi pusat ekonomi jasa modern yang dinamis dan kosmopolitan, yang mendukung peran kota sebagai platform bisnis global (Chan, 2017).

Hong Kong pada hakikatnya merupakan wilayah administrasi khusus dimana sebuah status administrasi ini muncul sebagai konsekuensi kebijakan dari Beijing (Satu Negara Dua Sistem) yang merupakan kebijakan politik khusus yang digagas oleh Deng Xiaoping untuk penyelesaian masalah status Hong Kong yang pada saat itu sedang dalam proses pengembalian kedaulatan dari Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang pada intinya menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Hongkong berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Tiongkok, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri, sedangkan bidang-bidang lain seperti yang sudah dijelaskan diatas seperti diantaranya mengenai perdagangan, mata uang, dan imigrasi seharusnya menjadi wewenang bagi wilayah penerima administrasi yang khusus, yaitu Hong Kong dan Macao (Guang, 2012).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di negara Tiongkok, terdapat keistimewaan Hong Kong yang tidak didapatkan oleh wilayah lain di Tiongkok. Namun disamping itu terdapat fakta-fakta berupa kemajuan yang sangat pesat pada wilayah lain di negara Tiongkok, contohnya seperti provinsi yang secara geografis berada dekat dengan Hong Kong yaitu Shanghai, Guangzhou dan provinsi lainnya. Kemajuan ekonomi dari beberapa wilayah ini juga berdampak pada pembangunan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Dilihat dari era dimana Hong Kong mengalami kemajuan yang sangat pesat, sebenarnya beberapa wilayah di Tiongkok juga mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor yang memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi Tiongkok.

Shanghai merupakan salah satu wilayah yang mengalami kemajuan ekonomi di Tiongkok, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan kemajuan sektor-sektor yang ada di

wilayah tersebut. Shanghai mampu menggunakan potensi yang dimiliki sebaik mungkin, salah satunya yaitu Shanghai menjadi kota pelabuhan tersibuk di dunia dalam hal penanganan kargo. Di sisi lain sektor industrinya makin berkembang sehingga mampu mengundang banyak investor asing untuk menanamkan investasinya (John L. Graham, 2007).

Guangzhou merupakan wilayah yang secara geografis berada sangat dekat dengan Hong Kong, Guangzhou merupakan salah satu wilayah yang terhitung maju di negara Tiongkok, melihat dari PDB Guangzhou yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan kemajuan dari berbagai sektor yang mendorong peningkatan pendapatan daerah (The People's Government of Guangzhou Municipality, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir Guangzhou juga mengalami pertumbuhan PDB tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Tiongkok secara keseluruhan. Ekspansi yang cepat dari perspektif konsumen terhadap perubahan pusat kota dan Guangzhou keseluruhan mengalami tiga transformasi dalam jangka waktu lama, hal ini menyebabkan pasokan akan barang-barang hasil industri meningkat (Guangzhou Daily Luo Hua Lin , 2017).

Pada tahun 1982 Perdana Menteri Inggris Margareth Teacher mengunjungi Tiongkok untuk melakukan perundingan mengenai status Hong Kong dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok selanjutnya membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam pasal 31 yang mengizinkan Hong Kong untuk menjad SAR (*Special Administrative Regions*) atau Wilayah Administrasi Khusus.

Kemudian, terbentuklah deklarasi bersama antara Tiongkok dengan Inggris pada tahun 1984 yang ditandatangani oleh PM Margareth Teacher selaku perwakilan dari Inggris dan PM Zhao Ziyang selaku perwakilan dari Tiongkok. Deklarasi ini berisi beberapa poin penting diantaranya yaitu, Tiongkok akan mengakui kedaulatan khusus atas Hong Kong dihitung efektif sejak 1 Juli 1997, Hongkong akan menjadi SAR dan dapat memiliki otonomi yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok yang lain, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, dan pertahanan militer. Ranah-ranah yang menjadi kewenangan daerah administratif khusus Hong Kong adalah seputar pada bidang ekonomi dan hubungan budaya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “Mengapa Tiongkok memberikan status *Special Administrative Region* (SAR) kepada Hong Kong?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep sebagai berikut :

1. Teori Rasional Integrasi

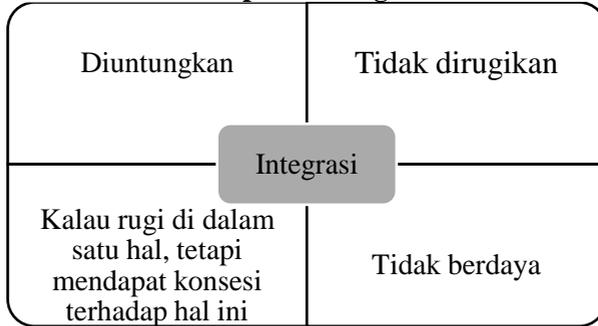
Dalam perkembangannya, sebuah negara tidak terlepas dari kejadian sejarah dari setiap daerah bagian didalamnya. Setiap sejarah menjadi suatu bukti adanya proses yang dilalui oleh suatu daerah agar mendapatkan pengakuan. Hong Kong merupakan salah satu wilayah kolonial Inggris yang kemudian tergabung ke dalam negara Tiongkok, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah negara Tiongkok. Proses integrasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok adalah suatu upaya dalam mempertahankan Hong Kong agar tetap menjadi bagian dari wilayahnya.

Integrasi secara umum adalah pembauran dari unit-unit berbeda dan terpisah hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Rasional itu sendiri adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2017). Oleh karenanya, rasional integrasi diartikan sebagai pembauran dari unit-unit yang berbeda menjadi satu kesatuan yang didasarkan pada pikiran dan pertimbangan yang logis.

Menurut salah satu Profesor di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammdiyah Yogyakarta Prof. Tulus Warsito.M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, mengemukakan Teori Rasional Integrasi, dimana beliau menyatakan bahwa,

“Satu Komponen yang bersedia bergabung (berintegrasi) dengan komponen yang lain dalam entitas yang baru jika merasa: (1) diuntungkan; (2) tidak dirugikan; (3) kalau rugi di dalam satu hal, tetapi mendapat konsesi terhadap hal ini; (4) dan tidak berdaya.” (Warsito, Teori Rasional Integrasi, 2018) (Warsito, Rasionalitas Politik, 2017)

Tabel 1.1
Komponen integrasi



Rasional Integrasi yang dimaksud oleh Profesor Tulus Warsito adalah satu komponen yang bersedia bergabung dengan komponen yang lain untuk membentuk entitas baru berdasarkan empat hal yang menjadi pertimbangan komponen tersebut. Selain itu rasional integrasi adalah bagaimana suatu entitas politik melakukan hubungan dengan entitas politik lainnya berdasarkan apa yang hendak dituju berdasarkan kepentingan diantara kedua entitas politik tersebut. Adanya komponen-komponen dalam integrasi menyatakan bahwa hubungan antara dua entitas politik memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak rugi.

Aplikasi dari teori ini dalam kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, bahwa Hong Kong merupakan wilayah bagian dari negara Tiongkok yang telah dikembalikan oleh Inggris di tahun 1997 setelah kurang lebih 150 tahun menjadi wilayah kolonialnya. Adanya pemindahtanganan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok menciptakan suatu gejolak baru dimana rakyat Hong Kong ingin berdiri sendiri dan menjadi negara berdaulat seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya opini-opini dari beberapa elemen masyarakat Hong Kong sebelum Hong Kong diserahkan ke Tiongkok. Namun Pemerintah Tiongkok memilih untuk melakukan proses integrasi dengan Hong Kong dengan menjadikannya sebagai daerah SAR atau wilayah administrasi khusus.

Pada awalnya Tiongkok menganut kebijakan administrasi *One China Policy* dimana Tiongkok yang berstatus sebagai negara kesatuan mengharuskan setiap wilayah didalamnya mengikuti aturan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan tidak ada perbedaan antar wilayah. Namun dikarenakan adanya desakan oleh rakyat Hong Kong yang menyatakan bahwa wilayah ini tidak mau kembali menjadi

bagian Tiongkok dikarenakan tidak adanya perubahan kebijakan administrasi *One China Policy* oleh pemerintah Tiongkok. Berdasarkan tujuan awal Tiongkok untuk mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagiannya, pemerintah Tiongkok mulai menganut kebijakan administrasi baru yaitu *One Country Two System*, atau kebijakan administrasi dimana beberapa wilayah tertentu di Tiongkok memiliki perbedaan aturan dalam politik dan ekonomi dibandingkan wilayah lainnya. Kebijakan ini mulai dianut oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1982 untuk mengakurkan paham sosialis yang anut oleh Tiongkok dengan wilayah-wilayah seperti Hong Kong dan Taiwan yang menganut paham kapitalis. (Ministry of Foreign Affairs, 2017) Dengan dianutnya kebijakan ini, Tiongkok dapat menjadikan Hong Kong sebagai wilayah khusus yang masih bisa menikmati ideologi dan kebebasan yang dimiliki di masa kolonial Inggris, dan pengadaan otonomi khusus dalam perekonomian.

Dengan dijadikannya Hong Kong sebagai salah satu wilayah SAR di negara Tiongkok, Hong Kong memiliki beberapa kebebasan yang tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok lainnya seperti dolar Hong Kong yang tetap dapat dipertukarkan secara bebas, selain itu perdagangan devisa, emas dan pasar saham masih beroperasi seperti sebelumnya. Masyarakat Hong Kong adalah masyarakat bebas dengan hak-hak yang dilindungi secara hukum. Pemerintah Hong Kong SAR mengikuti pendekatan tanpa campur tangan secara umum terhadap kebijakan ekonomi yang menekankan peran utama sektor swasta. Disisi lain Hong Kong juga memiliki kebebasan dalam memajukan sektor industri, sumber daya dan terhadap pergerakan modalnya (Cateora & L.Graham, 2007).

Berdasarkan penjelasan Bapak Tulus Warsito mengenai teori Rasional Integrasi yang berpengaruh terhadap hubungan satu komponen dengan komponen lainnya dalam upaya penyatuan dapat diaplikasikan kepada permasalahan ini sebagai berikut:

1. Diuntungkan

Bergabungnya komponen yang kecil dengan komponen yang besar dikarenakan komponen yang kecil merasa untung dan tidak merasa rugi.

2. Tidak dirugikan

Komponen kecil yang bergabung dengan komponen besar dengan kondisi tidak dirugikan, dimana komponen yang kecil tidak

mendapat kerugian maupun keuntungan yang signifikan dari hasil integrasi tersebut.

3. Kalau rugi di dalam satu hal, tetapi mendapat konsesi terhadap hal ini

Bergabungnya komponen yang kecil dengan komponen yang besar akan memberikan kerugian tertentu, namun komponen yang kecil mendapat konsesi tertentu dari hasil integrasi tersebut.

4. Tidak berdaya

Komponen yang kecil disaat bergabung dengan komponen yang besar tidak bisa memajukan kepentingannya sendiri dan hanya mengikuti kepentingan dari komponen yang besar tanpa adanya konsesi apapun (Warsito, 2018).

Bergabungnya Hong Kong kepada Tiongkok dianggap sebagai salah satu kerugian yang didapatkan oleh Hong Kong dibandingkan mendirikan negara sendiri. Namun walaupun Hong Kong mendapatkan kerugian, Hong Kong mendapatkan Konsesi dalam bentuk kebebasan otonomi yang sangat tinggi, Hong Kong dapat menggunakan sistem sendiri, mengatur perekonomian dan politik sendiri, melakukan pemilihan kepala pemerintahan sendiri kecuali urusan hubungan luar negeri seperti memiliki kedutaan sendiri dan hubungan diplomatik.

Hasil integrasi antara Hong Kong dan Tiongkok ini masuk kedalam bagian kuadran rasional integrasi yang ketiga. Dimana ditemukan bahwa terdapat kerugian yang diterima Hong Kong dari integrasinya dengan Tiongkok yang lalu berlanjut pada konsesi yang diberikan Tiongkok kepada Hong Kong. Hasil dari integrasi tersebut dibuktikan dengan status Hong Kong sebagai *Special Administration Region* (SAR).

2. Teori Pembangunan Ekonomi

Setiap negara memiliki kebutuhan dan ketergantungan antara sesama, dimana hal ini bertujuan kepada peningkatan sumber daya yang ada dalam suatu negara dan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kekurangannya. Jalannya perekonomian di suatu negara tidak terlepas dari bagaimana pemerintah mampu meningkatkan seluruh sektor-sektor di wilayahnya dalam mendorong majunya ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat

penting bagi setiap negara, dimana majunya perekonomian negara bisa diartikan sebagai gambaran masyarakatnya yang juga sejahtera.

Dalam bukunya yang berjudul, "*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*", ahli ekonomi dan politik Amerika Serikat Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa,

“Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan sebuah proses multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya dalam perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri. Pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain: perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil, perubahan kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan).” (Rostow W. W., 1960)

Proses pembangunan ekonomi menurut Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap diantaranya: masyarakat tradisional, pra-kondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, era konsumsi tinggi. Tahapan-tahapan tersebut memberikan tawaran terperinci pada pengambilan kebijakan di suatu negara mengenai tahapan dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori yang disampaikan Rostow ini melatarbelakangi banyak negara berkembang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka.

Rostow menyampaikan petunjuk-petunjuk jelas mengenai cara praktis dalam memperoleh sumber daya sebagai modal mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Cara tersebut disajikan dalam berbagai alternatif, yaitu: dana investasi dari pajak yang tinggi, dana

invesatasi dari pasar uang atau pasar modal, keuntungan yang didapat dari perdagangan internasional, dan investasi langsung modal asing.

Aplikasi dari teori ini dalam kasus yang diangkat di sini adalah, bahwa Hong Kong yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang tidak sama dengan Tiongkok yang menggunakan sistem pemerintahan komunis. Pembangunan ekonomi di wilayah Hong Kong sangatlah maju dan lebih maju daripada wilayah Tiongkok yang lain, dimana ketika wilayah ini kembali bergabung dengan Tiongkok, Beijing menjadikan Hong Kong sebagai *Special Administrative Region*, dimana disinilah Hong Kong dianggap lebih mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu pusat ekonomi di Asia.

Kemajuan ekonomi Hong Kong dapat dilihat dari tahap yang sudah dilaluinya. Dari lima tahap yang dijelaskan oleh Rostow, bahwa Hong Kong sudah mencapai tahap kelima yaitu era konsumsi tinggi. Inilah yang menjadi perbedaan antara Hong Kong dengan wilayah lain Tiongkok, dimana wilayah lain masih berada di tahap satu sampai empat. Inilah yang menjadi bukti dimana Hong Kong dengan ekonomi kapitalisnya mampu lebih maju daripada wilayah Tiongkok yang lain, dimana hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat Hong Kong yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan mahalnya harga properti dan pengeluaran harian di Hong Kong dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain.

D. Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara latar belakang masalah dengan kerangka pemikiran, penulis menemukan dua indikator mengapa Tiongkok memberikan status SAR kepada Hong Kong, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya implikasi dari penerapan kebijakan *One Country Two System* terhadap proses integrasi antara Tiongkok dan Hong Kong.
2. Hong Kong memiliki perekonomian yang berkembang sangat pesat dan lebih maju dibandingkan dengan wilayah Tiongkok yang lain. Hong Kong juga mampu menjadi wilayah yang memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita tinggi di dunia yang berfungsi sebagai jembatan penghubung pembangunan dengan wilayah Tiongkok lainnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun dalam sebuah penelitian ilmiah senantiasa terdapat tujuan penelitian. Oleh sebab itu terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai alasan mengapa Hong Kong dijadikan sebagai daerah SAR (Special Region Administrative) dinegara Tiongkok.
2. Penelitian ini menjadikan salah satu sarana penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis pelajari selama mengikuti proses perkuliahan dan menjadi salah satu bentuk pendalaman ilmu yang telah diperoleh.
3. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hal-hal seperti penerapan konsep satu negara dua sistem di Tiongkok, pengaruh kemajuan ekpnomi Hong Kong terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan, dan tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Tiongkok.
4. Penulis ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai posisi Hong Kong dalam pembangunan ekonomi Tiongkok, dana pentingnya Hong Kong dalam mendorong pembangunan ekonomi Tiongkok.
5. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi kesarjanaan (strata 1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan membahas mengenai posisi Hong Kong dalam pembangunan ekonomi negara Tiongkok mulai dari tahun 1982 sampai tahun 1997. Skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana pemerintah Tiongkok menerapkan sistem wilayah administrasi khusus (SAR) di Hong Kong dan hubungannya dengan sistem negara kesatuan yang dianut oleh Tiongkok. Unis analisa dalam penulisan skripsi ini berada dalam tingkat negara (Tiongkok). Skripsi ini menambahkan data-data di luar batas jangkauan penelitian yang masih memiliki relevansi terhadap batasan skripsi ini.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui pencarian untuk pertanyaan rumusan

masalah yang telah diajukan agar dapat terjawab dengan baik, dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu persoalan dengan mencari fakta-fakta yang terjadi untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mendasar pada data sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita dari surat kabar maupun internet .

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik kapustaka (library research). Sesuai dengan penggunaan data sekunder maka pencarian data akan difokuskan data-data pustaka yang akan di seleksi kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat mutlak penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan atau bagaimana cara menyajikan hasilpenelitian tersebut. Adapun sitematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : membahas mengenai kemajuan ekonomi Hong Kong dan posisinya sebagai pusat ekonomi terpenting di Tiongkok.

BAB III : membahas mengenai kebijakan administrasi *One Country Two System* negara Tiongkok.

BAB IV : Membahas mengenai keunggulan dan faktor-faktor penentu Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus.

BAB V : merupakan kesimpulan atau penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi ringkasan mengenai susunan penelitian dalam skripsi ini dari seluruh hal yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.